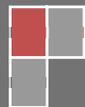


2023

BALAI
PENGELOLAAN
INFORMASI
SUMBER DAYA
KELAUTAN
DAN
PERIKANAN

Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2023 (Audited)

JALAN SEACORM KM.2, KEC. JEMBRANA, KAB. JEMBRANA,
BALI 82251
TELEPON (0365) 44269



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jembrana, 11 Januari 2024

Kepala,



Dr. Teja Arief Wibawa, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	45
F. Pengungkapan Penting Lainnya	48
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jembrana, 11 Januari 2024

Kepala,



Dr. Teja Arief Wibawa, M.Si

Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Per 31 Desember Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara Per 31 Desember TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp68.727.260 atau mencapai 00,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara Per 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp21.672.569.009 atau mencapai 97,17 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp22.303.218.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset Per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp178.318.807.428 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp55.661.466; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp88.960.696.640; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp89.302.449.322.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp178.318.807.428.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp57.527.260, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp18.375.794.038 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp18.318.266.778. Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp11.319.716 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp18.329.586.494.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp0, ditambah Defisit-LO sebesar Rp18.329.586.494, dikurangi dengan koreksi nilai aset non revaluasi sebesar Rp401.533.318 dan transaksi antar entitas senilai total Rp197.049.927.240, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp178.318.807.428.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022**

Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1		68.727.260	100,00	
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	2.925.699.000	2.337.257.787	79,89	
Belanja Barang	B.4	12.237.519.000	12.208.176.892	99,76	
Belanja Modal	B.5	7.140.000.000	7.127.134.330	99,82	
JUMLAH BELANJA		22.303.218.000	21.672.569.009	97,17	

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NERACA

Per 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam.Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.12	55,661,466	-
Jumlah Aset Lancar		55,661,466	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.13	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.14	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.15	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.16	54,816,312,000	-
Peralatan dan Mesin	C.17	88,412,715,807	-
Gedung dan Bangunan	C.18	26,558,738,330	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.19	12,795,916,887	-
Aset Tetap Lainnya	C.20	154,299,610	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.22	(93,777,285,994)	-
Jumlah Aset Tetap		88,960,696,640	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.23	85,105,764,384	-
Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan	C.24	-	-
Aset Lain-Lain	C.25	6,275,753,697	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.26	(2,079,068,759)	-
Jumlah Aset Lainnya		89,302,449,322	-
JUMLAH ASET		178,318,807,428	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.27	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.28	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.29	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.30	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.31	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.32	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	C.33	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.34	178,318,807,428	-
JUMLAH EKUITAS		178,318,807,428	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		178,318,807,428	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Pendapatan PNBP Lainnya		57.527.260	-
Pendapatan Badan Layanan umum		-	-
JUMLAH PENDAPATAN		57.527.260	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.337.257.787	-
Beban Persediaan	D.3	157.841.050	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.736.398.469	-
Beban Pemeliharaan	D.5	6.425.168.083	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	718.186.399	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	4.000.942.250	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		18.375.794.038	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(18.318.266.778)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(11.319.716)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		11.200.000	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		22.519.716	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(11.319.716)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(18.329.586.494)	-
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(18.329.586.494)	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(18.329.586.494)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.4	(401.533.318)	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	-
JUMLAH		(401.533.318)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	197.049.927.240	-
EKUITAS AKHIR	E.5	178.318.807.428	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dasar Hukum Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Entitas berkedudukan di Jalan Seacorm KM. 2, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali.

Entitas dan Rencana Strategis

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas dan fungsi di bidang data dan informasi kelautan dan perikanan. Balai Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memiliki tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan survei data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan verifikasi, validasi, dan analisis data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
4. Penyebarluasan dan pendokumentasian data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
5. Pemberian dukungan administrasi.

Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki SDM sebanyak 48 orang, yang terdiri dari 15 orang PNS dan 33 orang non PNS dengan Tingkat Pendidikan dan disiplin ilmu yang beragam. Secara rinci komposisi pegawai Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada table dibawah ini :

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR		JUMLAH
1	Doktoral	S3	2
2	Master	S2	5
3	Sarjana	S1	23
4	Diploma	D3	1
5	≤Sekolah Menengah Atas	≤SMA	17
JUMLAH			48 orang

PNS Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 15 orang dipetakan berdasarkan jabatan masing-masing, yang terbagi menjadi Pejabat Struktural 2 orang, Pejabat Fungsional 8 orang dan pelaksana 5 orang.

Kegiatan Perjalinan Kerjasama Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sampai dengan 31 Desember tahun 2023 Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memiliki 1 Perjanjian Kerja Sama (PKS), yaitu PKS antara Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang pengembangan informasi potensi penangkapan ikan guna pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara

secara optimal melalui pengembangan informasi potensi penangkapan ikan untuk Pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan MonSAKTI. Sistem SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan Tingkat satker mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Pemrosesan transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada satker telah sepenuhnya menggunakan SAKTI kelompok Pelaporan (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta modul GLP).

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai

Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja **(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan

penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset

Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak

terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan antisipasi terhadap perubahan kondisi prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga dan meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. Sampai dengan bulan September 2023 Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah dilakukan pengajuan revisi sebanyak 11 kali yaitu :

1. Revisi DIPA ke 1 terkait revisi buka blokir kegiatan alat pengolah data senilai Rp400.000.000 tanggal 24 Februari 2023;
2. Revisi POK 2 pada tanggal 15 Maret 2023 merupakan pergeseran anggaran dalam satu KRO dan satu kegiatan, serta penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam satu RO;
3. Revisi POK 3 pada tanggal 3 Mei 2023 merupakan pergeseran anggaran dalam satu KRO dan satu kegiatan, penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam satu RO, serta perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA;
4. Revisi POK 4 pada tanggal 22 Mei 2023 merupakan pergeseran anggaran dalam satu KRO dan satu kegiatan, penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam satu RO, serta perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA;
5. Revisi POK 5 pada tanggal 10 Juli 2023 merupakan penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam satu RO, serta perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA;
6. Revisi POK 6 pada tanggal 7 Agustus 2023 merupakan perubahan catatan halaman IV DIPA pemblokiran alokasi anggaran alokasi automatic adjustmen dan alokasi belanja tambahan (ABT) yang tidak sesuai dengan 8-point kesepakatan, serta perubahan rencana penarikan dana/atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA;

7. Revisi POK 7 pada tanggal 6 Oktober 2023 merupakan penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam 1 (satu) RO serta perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA;
8. Revisi DIPA pada tanggal 20 Oktober 2023 terkait rekomposisi/penambahan tanda blokir/Bintang kode 9 (Automatic Adjustment) sebesar Rp8.794.000.000 yang bersumber dari blokir kode 2 (ABT) pada RO Sarana Data Citra Satelit Radar (2329.RAN.002) untuk mendukung Program Prioritas KKP Pembangunan Modelling Kampung Nelayan Maju (Kalaju) di BIAK dan Lampung pada Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
9. Revisi POK 9 pada tanggal 31 Oktober 2023 terkait pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, berupa pengurangan alokasi anggaran belanja blokir anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp6.976.230.000;
10. Revisi POK 10 pada tanggal 16 November 2023 merupakan penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam 1 (satu) RO serta perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA;
11. Revisi POK 11 pada tanggal 28 November 2023 merupakan penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam 1 (satu) RO serta perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2,925,699,000	2,925,699,000
Belanja Barang	14,709,459,000	12,237,519,000
Belanja Modal	20,438,290,000	7,140,000,000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	38,073,448,000	22,303,218,000

Realisasi

*Pendapatan
Rp68.727.260*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp68.727.260 atau mencapai 100,00 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp0. Pada tahun 2023 tidak terdapat estimasi pendapatan hal ini dikarenakan, estimasi pendapatan 2023 ditentukan pada tahun 2021 yang dimana Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan masih dengan nama satker Balai Riset dan Observasi Laut. Sedangkan pada saat ditetapkannya Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tanggal 25 Februari 2022, Balai Pengelolaan Informasi berada di bawah Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal KKP. Sehingga tahun 2022 dan 2023 Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tidak memiliki estimasi pendapatan.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		11,200,000	100.00
Pendapatan sewa tanah, gedung, bangunan	-	6,872,260	100.00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	80,000	100.00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	-	50,350,000	100.00
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi	-	225,000	100.00
Jumlah	-	68,727,260	100.00

Realisasi Pendapatan Per 31 Desember TA 2023 Balai Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berasal dari :

1. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp11.200.000 berasal dari penjualan asset peralatan dan mesin yang berupa PC unit sejumlah 24 unit yang dalam kondisi rusak berat, berdasar risalah lelang nomor 480/66/2023 tanggal 19 Desember 2023 oleh Pejabat Lelang KPKNL Singaraja An. Nor Fuad Al Hakin, SH;
2. Pendapatan sewa tanah, Gedung, dan bangunan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp6.872.260 berasal dari sewa rumah dinas PNS balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 6 orang yang dipotong dengan mekanisme potongan SPM gaji induk PNS;
3. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp80.000 berasal dari sewa mes Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi lainnya Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar

Rp50.350.000 berasal dari pengujian kualitas air laboratorium kualitas perairan BPISDKP;

5. Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan dan informasi Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp225.000 berasal dari bimtek PPDPI oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara sebesar.

Selanjutnya Realisasi Pendapatan untuk periode Per 31 Desember TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022 tidak terdapat kenaikan ataupun penurunan realisasi pendapatan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 pengelolaan anggaran berada pada Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa KKP.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	11,200,000	-	11,200,000	100.00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6,872,260	-	6,872,260	100.00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	80,000	-	80,000	100.00
Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	50,350,000	-	50,350,000	100.00
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi	225,000	-	225,000	100.00
Jumlah	68,727,260	-	68,727,260	100.00

Realisasi

Belanja

Rp21.672.569.009

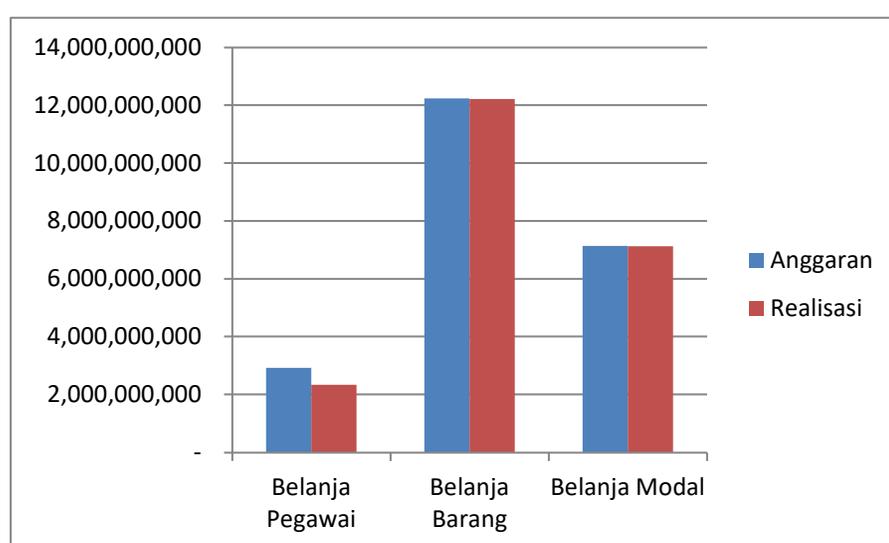
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Per 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp21.672.569.009 atau 97,17% dari anggaran belanja sebesar Rp22.303.218.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember TA 2023 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Per 31 Desember TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2,925,699,000	2,337,258,221	79.89
Belanja Barang	12,237,519,000	12,208,176,892	99.76
Belanja Modal	7,140,000,000	7,127,134,330	99.82
Total Belanja Kotor	22,303,218,000	21,672,569,443	97.17
Pengembalian Belanja	-	(434)	
Total Belanja	22,303,218,000	21,672,569,009	97.17

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Per 31 Desember TA 2023 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari tahun 2022, hal ini dikarenakan pengelolaan anggaran Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022 berada pada Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa KKP.

Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2,337,257,787	-	2,337,257,787	100.00
Belanja Barang	12,208,176,892	-	12,208,176,892	100.00
Belanja Modal	7,127,134,330	-	7,127,134,330	100.00
Jumlah	21,672,569,009	-	21,672,569,009	100.00

*Belanja
Pegawai
Rp2.337.257.787*

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.337.257.787 dan Rp0. Sampai periode Desember 2023 belanja pegawai Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mencapai Rp2.337.257.787 atau sebesar 79.89%, hal ini disebabkan karena terdapat kelebihan pagu anggaran belanja pegawai yang disebabkan terdapat perpindahan pegawai (peneliti) ke BRIN sebanyak 15 orang. Realisasi belanja pegawai Per 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari TA 2022. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 pengelolaan anggaran Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berada pada Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa KKP. Tambahkan rincian pegawai

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	810.448.200	0	810.448.200	100,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.112	0	10.112	100,00
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	54.290.450	0	54.290.450	100,00
Belanja Tunj. Anak PNS	20.705.024	0	20.705.024	100,00
Belanja Tunj. Struktural PNS	25.200.000	0	25.200.000	100,00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	50.532.000	0	50.532.000	100,00
Belanja Tunj. PPh PNS	940.550	0	940.550	100,00
Belanja Tunj. Beras PNS	49.173.180	0	49.173.180	100,00
Belanja Uang Makan PNS	117.108.000	0	117.108.000	100,00
Belanja Tunjangan Umum PNS	18.175.000	0	18.175.000	100,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	5.933.000	0	5.933.000	100,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	192	0	192	100,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.080.000	0	1.080.000	100,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	144.840	0	144.840	100,00
Belanja Uang Makan PPPK	1.332.000	0	1.332.000	100,00
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	9.649.816	0	9.649.816	100,00
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.157.692.857	0	1.157.692.857	100,00
Belanja Lembur	14.843.000	-	14.843.000	100,00
Jumlah Belanja Kotor	2.337.258.221	0	2.337.258.221	100,00
Pengembalian Belanja Pegawai	(434)	-	(434)	100,00
Jumlah Belanja	2.337.257.787	0	2.337.257.787	100,00

Belanja Barang
Rp12.208.176.892

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.208.176.892 dan Rp0. Realisasi belanja barang Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari tahun 2022. Hal ini

disebabkan pada tahun 2022 pengelolaan anggaran Balai Pengelolaan Infomasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berada pada Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa KKP.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1,900,491,471	0	1,900,491,471	100.00
Belanja Barang Non Operasional	83,650,355	0	83,650,355	100.00
Belanja Barang Persediaan	387,458,386	0	387,458,386	100.00
Belanja Jasa	2,867,178,068	0	2,867,178,068	100.00
Belanja Pemeliharaan	6,251,212,213	0	6,251,212,213	100.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	718,186,399	0	718,186,399	100.00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	0	-	100.00
Jumlah Belanja Kotor	12,208,176,892	0	12,208,176,892	100.00
Pengembalian Belanja	-	0	-	-
Jumlah Belanja	12,208,176,892	0	12,208,176,892	100.00

Belanja Modal **B.5 Belanja Modal**

Rp7.127.134.330

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.127.134.330 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Per 31 Desember TA 2023 Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dibandingkan TA 2022, hal ini disebabkan pada tahun 2022 pengelolaan anggaran Balai Pengelolaan Infomasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berada pada Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa KKP.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,551,406,900	0	1,551,406,900	100.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	368,266,967	0	368,266,967	100.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	74,927,508		74,927,508	100.00
Belanja Modal Jaringan	142,310,000		142,310,000	100.00
Belanja Modal Lainnya	4,990,222,955	0	4,990,222,955	100.00
Jumlah Belanja Kotor	7,127,134,330	0	7,127,134,330	100.00
Pengembalian	-	-	-	-
Jumlah Belanja	7,127,134,330	0	7,127,134,330	100.00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi belanja modal tanah pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada TA 2023.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.551.406.900 dan Rp0. Belanja modal peralatan dan mesin Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berupa pengadaan alat PC pengolah data dan informasi geospasial SDKP, pengadaan laptop pengolah data dan informasi geospasial SDKP, system penerangan lampu jalan, dan pekerjaan fisik pengadaan dan pemasangan material catu daya Listrik 345 kVa.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Per 31 Desember TA 2023 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 pengelolaan anggaran Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berada pada Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa KKP.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,551,406,900	0	1,551,406,900	100.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengaw asan Peralatan	0	0	0	0.00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	1,551,406,900	0	1,551,406,900	100.00
Pengembalian	0	0	0	0.00
Jumlah Belanja	1,551,406,900	0	1,551,406,900	100.00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp443.194.475 dan Rp0. Belanja modal Gedung dan bangunan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berupa pembangunan rumah gardu catu daya Listrik 345 Kva sebesar Rp368.266.967. Konsultan perencanaan dan konsultan pengawas masing-masing sebesar Rp48.029.700 dan Rp26.897.808 dari kegiatan peningkatan kapasitas stasiun bumi.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Per 31 Desember TA 2023 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 pengelolaan anggaran Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berada pada Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa KKP.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2023	T.A 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	368,266,967	0	0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengaw asan Gedung dan Bangunan	74,927,508	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	443,194,475	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	443,194,475	0	0.00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp142.310.000 dan Rp0. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berupa pengadaan kabel jaringan Listrik. Realisasi Belanja Modal jalan, irigasi, dan jaringan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Per 31 Desember TA 2023 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 pengelolaan anggaran Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berada pada Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa KKP.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.990.222.955 dan Rp0. Realisasi belanja modal lainnya Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berupa :

1. Provision of RADARSAT-2 data scenes with an area of one scene of at least 40 km x 40 km sejumlah 100 scene sebesar Rp1.881.800.900

2. Provision of COSMO-SKYMED data scenes with an area of one scene of at least 40 km x 40 km

Realisasi Belanja Modal Lainnya Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Per 31 Desember TA 2023 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 pengelolaan anggaran Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berada pada Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa KKP

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2023	T.A 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	4,990,222,955	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	4,990,222,955	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	4,990,222,955	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0. dan Rp0.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2023 dan 2022*

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN (%)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-		
Kas Lainnya dari Hibah	-	-		
Jumlah	-	-	-	-

Persediaan

C.4 Persediaan

Rp55.661.466

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan TA 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp55.661.466. dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

Persediaan	TH 2023	TH 2022	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN (%)
Barang Konsumsi	31,641,466	-	31,641,466	100.00
Bahan Baku	24,020,000	-	24,020,000	100.00
Jumlah	55,661,466	-	55,661,466	100.00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

Rp54.816.312.000

C.5 Tanah

Tanah yang dimiliki Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp54.816.312.000 dan Rp0. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	Rp	-
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	54,816,312,000
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	54,816,312,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	54,816,312,000

Transfer Masuk dari Biro Umum dan PBJ berdasarkan BAST Nomor B.4345/SJ.6/PL.450/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023.

Peralatan dan Mesin
Rp88.412.715.807

C.6 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp88.412.715.807 dan Rp0. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023		Rp -
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	635.050.000
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	92.980.381.966
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Koreksi Tambah	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	(519.335.542)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(4.683.380.617)
Koreksi Pencatatan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	88.412.715.807
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	84.394.597.973
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	4.018.117.834

Mutasi tambah:

- Pembelian berupa:
 1. Notebook pengolah data dan informasi geospasial senilai Rp204.000.000.
 2. PC pengolah data dan informasi geospasial dengan total nilai sebesar Rp192.000.000.
 3. Sistem penerangan lampu jalan dengan total nilai sebesar Rp239.050.000

● Transfer Masuk :

Transfer Masuk Peralatan dan Mesin senilai total Rp. 92.980.381.966. Transfer Masuk Biro Umum berdasarkan BAST Nomor B.4345/SJ.6/PL.450/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023. Dan Transfer Masuk dari Pusat Data Statistik dan Informasi berdasarkan BAST Nomor B.3239/SJ.7/PL.450/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023.

Mutasi Kurang :

- Reklasifikasi Keluar :
 1. Reklas keluar ada salah pencatatan kode barang Alat kalibrator Listrik (303005104) kemudian direklas masuk menjadi Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil (5030601001) dengan surat keterangan reklas nomor B.2028/BPISDKP/PL.760/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp916.356.900

2. Reklas keluar sebanyak 56 NUP dengan nilai total Rp3.767.023.717 sebagai tindak lanjut revidi Itjen Semester 1 tahun 2023, bahwa ada kesalahan pencatatan kode barang dimana dicatat sebagai Alat Penerbangan (3.15) berupa Public Address Branch Exchange(PABX) sebanyak 1 NUP, Closed circuit television sebanyak 1 NUP, Air conditioning sebanyak 38 NUP, GPS Survey sebanyak 6 NUP, dan GPS Mapper Counter sebanyak 10 NUP.

- Penghapusan :

sedang dalam proses penghapusan komputer dengan penjualan sejumlah 24 unit dengan nilai sebesar Rp519.335.542.

Gedung dan Bangunan
Rp26.558.738.330

C.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan TA 2023 dan 2022 adalah Rp26.558.738.330 dan Rp0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022		-
Mutasi tambah:		
Pembelian		40.825.245
Transfer Masuk		26.115.543.855
Pengembangan Melalui KDP		402.369.230
Mutasi kurang:		
Koreksi pencatatan		-
Saldo per 31 Desember 2023		26.558.738.330
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023		(3.304.329.065)
Nilai Buku per 31 Desember 2023		23.254.409.265

Mutasi tambah :

- Pembelian berupa :
 - pencatatan atas Pembayaran 85% Biaya Perencanaan Pembangunan Rumah Catu Daya Listrik 345 KVA sebesar Rp40.825.245 berdasarkan SPK nomor 014/SP.BPISDKP/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan nilai kontrak Rp49.029.700
- Transfer masuk :
 - ❖ Transfer masuk BMN milik BPISDKP dari Biro Umum dan PBJ dengan nomor BAST B.4345/SJ.6/PL.450/VIII/2023 tanggal 18 Agustus

2023 sejumlah 35 unit dengan nilai Rp25.177.643.855

- ❖ Transfer masuk sejumlah 3 unit/senilai Rp937.300.000 merupakan pecatatan atas Transfer Aset BMN milik BPISDKP dari Biro Umum dan PBJ dengan nomor BAST B.4345/SJ.6/PL.450/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023

- Pengembangan Melalui KDP senilai Rp402.369.230,- mengkafitalisasi nilai aset Bangunan Instalasi Lainnya dengan nomor asset 4.01.01.04.999 NUP. 3 dengan nilai perolehan awal Rp40.825.245,- . Nilai Rp402.369.230,- merupakan pencatatan atas :
 - ❖ Pembayaran 15% Biaya Perencanaan Pembangunan Rumah Catu Daya Listrik 345 KVA sebesar Rp7.204.455 berdasarkan SPK nomor 014/SP.BPISDKP/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan nilai kontrak Rp49.029.700
 - ❖ Pembayaran 100% Biaya Pengawasan Pembangunan Rumah Catu Daya Listrik 345 KVA sebesar Rp26.897.808,- berdasarkan SPK nomor 021/SP.BPISDKP/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 dengan nilai kontrak Rp49.029.700
 - ❖ Pembayaran Uang Muka (termin 1), 95% (termin 2) dan 5 % (termin 3) retensi atas pekerjaan fisik Pembangunan Rumah Catu Daya Listrik 345 KVA dengan total pembayaran sebesar Rp368.266.967 berdasarkan kontrak nomor PL.19/SP.BPISDK/X2023 tanggal 6 Oktober 2023

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp12.795.916.887

C.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.759.916.887 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	12.795.916.887
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2023	12.795.916.887
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(6.078.358.956)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	6.717.557.931

Mutasi tambah :

Transfer Masuk Jalan,Irigasi dan Jaringan senilai total Rp.12.795.916.887. Transfer Masuk dari Biro Umum berdasarkan BAST Nomor B.4345/SJ.6/PL.450/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023.

Aset Tetap Lainnya
Rp154.299.610

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per TA 2023 dan 2022 adalah Rp154.299.610 dan Rp0.

Saldo per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	154.299.610
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2023	154.299.610
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	154.299.610

Transfer Masuk Aset Tetap Lainnya senilai total Rp.154.299.610. Transfer Masuk dari Biro Umum berdasarkan BAST Nomor B.4345/SJ.6/PL.450/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023.

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp0

C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp(93.777.285.994)

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp(93.777.285.994) dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun

Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Aset Tak Berwujud
Rp85.105.764.384

C.11 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) TA 2023 dan 2022 adalah Rp85.105.764.384 dan Rp0, dengan rincian sebagai berikut.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Rp0

C.12 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan TA 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Lain-Lain
Rp6.275.753.697

C.13 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain TA 2023 dan 2022 adalah Rp6.275.753.697 dan Rp0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp(2.079.068.759)

C.14 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(2.079.068.759) dan Rp0.

Uang Muka dari KPPN
Rp0.

C.15 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0 **C.16 Utang kepada Pihak Ketiga**
Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Ekuitas Rp178.318.807.428 **C.17 Ekuitas**
Ekuitas TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp178.318.807.428 dan Rp0. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP
Rp57.527.260*

D.1 Pendapatan

Jumlah Pendapatan pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk periode TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp57.527.260 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	%NAIK (TRN)
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha			
Pendapatan Sew a Tanah, Gedung, Bangunan	6,872,260	-	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	80,000	-	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	-	-	-
Jumlah Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha	6,952,260	-	-
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum			
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	50,350,000	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Lalu	-	-	-
Jumlah Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	50,350,000	-	-
Pendapatan Jasa Lainnya			
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	225,000	-	-
Jumlah Pendapatan Jasa Lainnya	225,000	-	-
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	57,527,260	-	-
Jumlah	57,527,260	-	-

1. Pendapatan sewa tanah, Gedung, dan bangunan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp6.872.260 berasal dari sewa rumah dinas PNS balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 6 orang yang dipotong dengan mekanisme potongan SPM gaji induk PNS;
2. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp80.000 berasal dari sewa mes Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan;

3. Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi lainnya Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp50.350.000 berasal dari pengujian kualitas air laboratorium kualitas perairan BPISDKP;
4. Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan dan informasi Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp225.000 berasal dari bimtek PPDPI oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara sebesar.

Beban Pegawai **D.2 Beban Pegawai**

Rp2.337.257.787

Beban Pegawai untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.337.257.787 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2023 dan TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	810,448,200	-	810,448,200	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	9,678		9,678	100.00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	54,290,450		54,290,450	100.00
Beban Tunj. Anak PNS	20,705,024		20,705,024	100.00
Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000		25,200,000	100.00
Beban Tunj. Fungsional PNS	50,532,000		50,532,000	100.00
Beban Tunj. PPh PNS	940,550		940,550	100.00
Beban Tunj. Beras PNS	49,173,180		49,173,180	100.00
Beban Uang Makan PNS	117,108,000		117,108,000	100.00
Beban Tunjangan Umum PNS	18,175,000		18,175,000	100.00
Beban Gaji Pokok PPPK	5,933,000		5,933,000	100.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	192		192	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1,080,000		1,080,000	100.00
Beban Tunjangan Beras PPPK	144,840		144,840	100.00
Beban Uang Makan PPPK	1,332,000		1,332,000	100.00
Beban Uang Lembur	14,843,000		14,843,000	100.00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1,157,692,857	-	1,157,692,857	100.00
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	9,649,816	-	9,649,816	100.00
Jumlah	2,337,257,787	0	2,337,257,787	100.00

Beban
Persediaan
Rp157.841.050

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp157.841.050 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	92,254,550	0	92,254,550	100.00
Beban Persediaan Bahan Baku	65,586,500	0	65,586,500	100.00
Jumlah Beban Persediaan	157,841,050	0	157,841,050	100.00

Beban persediaan konsumsi Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp92.254.550 berupa Alat Tulis Kantor (ATK), komputer suplay, dan bahan penunjang laboratorium, sedangkan beban persediaan bahan baku Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp65.586.500 berupa bahan kimia laboratorium.

Beban Barang
dan Jasa
Rp4.736.398.469

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.736.398.469 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1,697,510,761	0	1,697,510,761	100.00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	31,682,980	0	31,682,980	100.00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	888,260	0	888,260	100.00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	128,760,000	0	128,760,000	100.00
Beban Barang Operasional Lainnya	40,034,000	0	40,034,000	100.00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,615,470	0	1,615,470	100.00
Beban Bahan	65,650,355	0	65,650,355	100.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	18,000,000	0	18,000,000	100.00
Beban Langganan Listrik	868,609,608	0	868,609,608	100.00
Beban Langganan Telepon	7,334,282	0	7,334,282	100.00
Beban Langganan Air	94,395,000	0	94,395,000	100.00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	973,352,958	0	973,352,958	100.00
Beban Sewa	197,115,000	0	197,115,000	100.00
Beban Jasa Profesi	2,700,000	0	2,700,000	100.00
Beban Jasa Lainnya	608,749,795	0	608,749,795	100.00
Jumlah	4,736,398,469	0	4,736,398,469	100.00

Beban Pemeliharaan Rp6.425.168.083

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.425.168.083 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,346,143,950	0	1,346,143,950	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	29,067,000	0	29,067,000	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,169,267,073	0	4,169,267,073	100.00
Beban Pemeliharaan Jalan, dan Jembatan	263,977,000	0	263,977,000	100.00
Beban Pemeliharaan Irigasi	118,643,000	0	118,643,000	100.00
Beban Pemeliharaan Jaringan	324,114,190	0	324,114,190	100.00
Beban Persediaan Suku Cadang	173,955,870	0	173,955,870	100.00
Jumlah	6,425,168,083	0	6,251,212,213	100.00

Beban
Perjalanan Dinas
Rp718.186.399

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp718.186.399 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	694,986,399	0	694,986,399	100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Lua Kota	23,200,000	0	23,200,000	100.00
Jumlah	718,186,399	0	718,186,399	100.00

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan
Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp4.000.942.250

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.000.942.250 dan Rp0.

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Kegiatan Non
Operasional
Rp(11.319.716)

D.11. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.319.716 dan Rp0

Pos Luar Biasa **D.12. POS LUAR BIASA**

Rp0

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp0</i>	E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Defisit LO</i> <i>Rp18.329.586.494</i>	E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode TA 2023 dan 2022 adalah defisit sebesar Rp18.329.586.494 dan Rp0.
<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar</i> <i>Rp0</i>	E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode TA 2023 sebesar Rp0.
<i>Penyesuaian Nilai Aset</i> <i>Rp0</i>	E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.
<i>Koreksi Nilai Persediaan</i> <i>Rp0</i>	E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Selisih Revaluasi Aset Tetap</i> <i>Rp0</i>	E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset Non Revaluasi Rp(401.533.318) **E.3.5 Koreksi Aset Non Revaluasi**
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(401.533.318) dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-lain Rp0 **E.3.6 Koreksi Lain-lain**
Koreksi Lain-Lain untuk periode TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas Rp197.049.927.240 **E.4 Transaksi Antar Entitas**
Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp197.049.927.240 dan Rp0. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode TA 2023, DDEL sebesar Rp68.727.260 sedangkan DKEL sebesar Rp21.672.569.009.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp175.446.085.491. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung TA 2023 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung TA 2023 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir
Rp178.318.807.428

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp178.318.807.428 dan Rp0.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: KEP.94/KPA/BPISDKP/KU.110/XI/2023 Tentang Perubahan kedua atas penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, Bendahara Penerima PNBPN, dan Anggota Pengelola PNBPN pada tanggal 1 November 2023 telah dilakukan penyesuaian jumlah honorarium Kuasa Pengguna anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan.

Penggantian pejabat dimaksud adalah sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Semula	Menjadi
Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp 3.420.000	Rp 3.010.000
	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp 2.920.000	Rp 2.920.000
	Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM	Rp 608.000	Rp 500.000
	Bendahara Pengeluaran	Rp 1.320.000	Rp 1.090.000
	Staf Pengelola Keuangan	Rp 570.000	Rp 570.000
	Staf Pengelola Keuangan	Rp 980.000	Rp 810.000
	Staf Pengelola Keuangan	Rp 980.000	Rp 810.000
	Bendahara PNBPN	Rp 340.000	Rp 340.000
	Staf Pengelola PNBPN	Rp 260.000	Rp 260.000

- Terdapat belanja barang operasional-penanganan pandemi COVID-19 berupa lisensi aplikasi video conference dengan pagu sebesar Rp1.616.000, yang sudah direalisasikan pada bulan Februari 2023 dengan nomor SPM 00026/632004/2023 dan nomor SP2D 231321303000038 pada tanggal 7 Februari 2023 sebesar Rp1.615.470.
- Terdapat pendapatan perolehan asset lainnya sebesar Rp3.108.422.055 yang merupakan pencatatan atas koreksi nilai kurang data citra satelit sedang (lebih kasar dari 4 meter) dengan kode barang 8010101042 NUP.3 berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Nomor B.2029/BPISDKP/PL.760/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023. Dan atas transaksi tersebut telah dibuat jurnal penyesuaian dengan nomor 007 pada tanggal 31 Desember 2023

- Terdapat kesalahan pembebanan atas belanja barang penambah daya tahan tubuh (52113) ke belanja pengiriman surat dinas pos pusat sebesar Rp379.000. Atas koreksi tersebut telah dibuat jurnal penyesuaian dengan nomor 0006 pada tanggal 31 Desember 2023